

STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BOGOR

Ade Triono

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: adetriono@gmail.com

Djunita Warsita

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: djunitawarsita@gmail.com

ABSTRACT

Strategy for Poverty Management in Bogor Regency. This study aims to describe the strategy of handling poverty in Bogor Regency carried out by both the Regional Government and the Central Government. The method used in this study is descriptive analytical. Data is collected through observation, interviews, documentation studies and literature relating to these handling efforts. Operationalization of data collection is described in concepts, variables, dimensions, and indicators. The data is analyzed using SWOT Analisis, to find out the strengths, weaknesses, opportunities and threat, so that the problem can be mapped to overcome them. The results show that the efforts of the Bogor District Government to overcome the obstacles to the problem of poverty are carried out in the form of the involvement of local governments in empowering the community economy, by implementing poverty reduction policies and programs from both the local government and the central government.

Keywords: strategy, policy, handling, poverty, Bogor.

ABSTRAK

Strategi Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi penanganan kemiskinan di Kabupaten Bogor yang dilakukan oleh baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi dan kepustakaan yang berkaitan dengan upaya penanganan tersebut.. Operasionalisasi pengumpulan data digambarkan dalam konsep, variabel, dimensi, dan indikator. Data dianalisis dengan menggunakan Analisis SWOT, untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sehingga dapat dipetakan masalahnya untuk menanggulangnya. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk mengatasi hambatan permasalahan kemiskinan dilakukan dalam bentuk keterlibatan pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan melakukan kebijakan dan program penanganan kemiskinan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Kata kunci: strategi, kebijakan, penanganan, kemiskinan, Bogor.

PENDAHULUAN

Tentang pembangunan yang merupakan amanat rakyat, Sarundayang (1999: 16) mengungkapkan kembali apa yang pernah dikemukakan oleh Rasyid (1996: 37). bahwa kewajiban Pemerintah berupa pengaturan (*regulation*) dan pelayanan (*service*). Kegiatan yang dilaksanakan pemerintah harus mampu memberdayakan masyarakat (*empowering*), memberikan pelayanan (*service*) yang sesuai dengan keinginan masyarakat, serta pembangunan yang merata. Pembangunan dilakukan secara bertahap dan menyeluruh dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tataran realitas di lapangan, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum sejahtera dan hidup di bawah garis kemiskinan. Dampak pembangunan belum dirasakan oleh sebagian masyarakat.

Menurut Team Nasional Program Penanganan Kemiskinan (TNP2K), berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah maupun Pemda yaitu mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil. Ada beberapa program seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH), program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beras untuk keluarga miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM mandiri) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Penanganan masalah pengentasan kemiskinan di Indonesia termasuk di Kabupaten Bogor memerlukan strategi

yang jitu. Para pelaksana dan *stake holder* memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai target secara maksimal.

Menurut George (1997) konsep strategi memiliki pengertian yakni:

Strategi berasal dari bahasa Yunani dari kata **Strategos** yang berarti jenderal. Secara harafiah berarti seni para jenderal. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus strategi tertentu sebagai penempatan misi perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.

Jadi strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan dapat diimplementasikan misinya. Makna dalam strategi ini adalah bahwa para manajer memainkan peran yang aktif sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Strategi juga merupakan pola respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

Strategi dapat dijalankan dengan menggunakan analisis *SWOT* sebagaimana pendapat dari Rangkuti (2014: 19) yang menjelaskan bahwa “Analisis *SWOT* adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (*Strengths* dan peluang (*oportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*)”.

Untuk lebih jelasnya mengenai analisis *SWOT* dapat dilihat pada diagram berikut.

Diagram Analisis SWOT



Sumber: Rangkuti (2014: 20)

Lebih jelasnya, masing-masing kuadran dalam Analisis SWOT dapat diterangkan sebagai berikut.

- a. Kuadran 1 merupakan situasi yang menguntungkan artinya perusahaan memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat dimanfaatkan. Strategi yang digunakan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented Strategy*).
- b. Kuadran 2 perusahaan memiliki kekuatan dari internal meskipun terdapat ancaman. Strategi yang digunakan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar).
- c. Kuadran 3 fokus dari perusahaan, dalam hal ini adalah meminimalkan masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih banyak.

- d. Kuadran 4 merupakan kondisi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal

Analisis SWOT dapat digunakan sebagai strategi yang dilakukan dalam penanganan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah di Kabupaten Bogor. Hal ini merupakan salah satu upaya yang diusahakan oleh para pengambil keputusan dari pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka menangani permasalahan kemiskinan yang terjadi di wilayahnya. Diharapkan dengan analisis itu dapat mengurangi atau meminimalkan jumlah warga masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Demikian juga diharapkan, mereka yang berada di bawah garis kemiskinan bisa mencapai taraf hidup dan kehidupan yang layak dan sejahtera lahir batin.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, penulis menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut.

Tabel 1 Kerangka Pemikiran Penelitian Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bogor

INPUT	PROSES	OUTPUT
- Kriteria dan Indikator Kemiskinan serta Konsep Pengentasan Kemiskinan - Konsep teoritis tentang indikator penanganan kemiskinan - Kondisi fisik kab.bogor - Wilayah Studi - Kondisi Kependudukan - Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat	- Masalah dan Kendala terjadinya Kemiskinan. - Faktor-faktor penyebab dan masalah terjadinya kemiskinan - Analisis SWOT (Upaya penanganan Kemiskinan)	Kesimpulan dan Rekomendasi

Sumber: Hasil olahan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Menurut Moch. Nazir (1988: 63), metode deskriptif didefinisikan sebagai “Suatu metode dengan meneliti status kelompok, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun peristiwa di masa sekarang”. Tujuan penelitian deskriptif ialah untuk memberikan gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena. Selanjutnya Moch. Nazir (1988: 105) mengemukakan, “Penelitian Deskriptif merupakan study untuk menemukan fakta-fakta dengan interpretasi tepat”.

Operasionalisasi penelitian dapat digambarkan dalam tabel 2. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Observasi: alat pengumpul dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan.
2. Wawancara: dibedakan dalam dua macam, yaitu: Responden adalah sumber data primer, data tentang dirinya sendiri sebagai objek sasaran penelitian. Informan ialah sumber

data sekunder, data tentang pihak lain, tentang responden. Adapun untuk mendapatkan data dan fakta berasal dari Informan/ responden berjumlah 30 orang dengan rincian: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor (1 orang), Perangkat Kecamatan Cibinong (2 orang), Kepala Kelurahan/Desa (2 orang), Keluarga miskin (20 orang), Tokoh masyarakat (2 orang), Tokoh agama (2 orang) dan Lembaga Sosial Masyarakat (1 orang).

3. Dokumentasi: Pada penelitian ini dalam mengumpulkan data melalui Renstra, Lakip, RPJMD dan Kabupaten Bogor Dalam Angka serta Profil Kabupaten Bogor.
4. Kajian kepustakaan: diperoleh dari berbagai sumber maupun catatan yang relevan dengan penelitian.

Adapun tahapan yang perlu dilakukan dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2012: 246) adalah sebagai berikut.

1. Data *Reduction* (reduksi data) merupakan proses berfikir yang memerlukan kecerdasan dan wawasan tinggi.

Tabel 2 Operasionalisasi Penelitian Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Bogor 2018

URAIAN	PENJELASAN
Konsep	Strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bogor
Variabel	Strategi <i>SWOT</i> (Pendapat Teori Rangkuti)
Dimensi	Kekuatan (<i>Strength</i>), Peluang (<i>Opportunity</i>), Kelemahan (<i>Weakness</i>) dan Ancaman (<i>Threats</i>)
Indikator	1. Kekuatan (<i>Strength</i>) a. Wilayah Kabupaten Bogor memiliki potensi pertanian yang baik, dimana produksi hasil pertanian cukup besar. b. Sebagian besar penduduknya adalah petani. c. Terdapatnya perkembangan kawasan lahan pertanian yang di indikasikan maraknya masyarakat petani lebih suka berkebun. d. Terdapatnya beberapa jenis usaha kecil menengah sebagai bentuk pasca usaha tani.baik hasil dari sungai seperti ikan asin dan dari hasil kebun. e. Terdapatnya komoditas unggulan yang dapat meningkatkan pendapatan petani. 2. Peluang (<i>Opportunity</i>) a. Ada beberapa usaha pasca tani sebagai usaha kecil menengah yang dikelola oleh masyarakat yang diharapkan dapat memberikan investasi sosial untuk pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah dengan kreteria, target dan sasaran yang tepat. b. Perkembangan sektor permukiman dan perumahan yang pesat. c. Terdapat kelompok-kelompok masyarakat petani yng mengembangkan budidaya pertanian seperti ikan dan makanan. d. Terdapatnya Objek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 3. Kelemahan (<i>Weakness</i>) a. Aksesibilitas transfortasi jalan yang rusak/macet sehingga mobilitas produksi dan kerja menjadi terhambat. b. Area pertanian berubah fungsi menjadi perumahan dan industry c. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. d. Sarana dan prasarana pertanian yang sangat terbatas. e. Tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah. f. Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hasil pertanian. g. Terbatasnya akses pasar dan pemasaran h. Kurang maksimalnya fungsi KUD dalam menunjang pengembangan ekonomi wilayah hasil produksi pertanian dan buah-buahan. 4. Ancaman (<i>Threats</i>). a. Menurunnya kualitas lahan dan semakin tingginya perubahan guna lahan akibat adanya kawasan permukiman yang terpencar. b. Mahalnya beban operasional bagi petani seperti pupuk dan pembasmi hama sehingga menghambat produktivitas petani.

Sumber: Hasil olahan Peneliti

2. Data *Display* (penyajian data) merupakan penyajian yang dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya sehingga data akan semakin mudah dipahami.
3. *Concluding drawing/ verification* (penarikan simpulan/ verifikasi) merupakan penarikan simpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan

Pada dasarnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi:

- 1) Kemiskinan absolut, Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan.
 - 2) Kemiskinan relatif. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup diatas yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
 - 3) Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.
- jelasan dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah:
- 1) Orang miskin dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga miskin.
 - 2) Orang Hidup dan dibesarkan dalam perkampungan kumuh dengan kebudayaan kemiskinan.
 - 3) Orang Tidak mempunyai cukup pengetahuan yang relevan untuk dapat digunakan sebagai modal kerja atau berusaha.
 - 4) Minimnya pelayanan fasilitas umum yang dapat dijangkau dipemukiman kumuh.
 - 5) Pranata ekonomi yang kapitalistik, yaitu yang menekankan bahwa setiap orang tergantung pada dirinya sendiri untuk berusaha secara kompetitif supaya dapat menghasilkan uang dan atau materi untuk pemenuhan kebutuhan- kebutuhan dalam kehidupannya.
 - 6) Pranata-pranata dalam masyarakat yang lebih menekankan pada Pertumbuhan ekonomi dan Teknologi dari pada kepentingan sosial atau kesejahteraan sosial warganya.
 - 7) Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran karena diadopsinya teknologi baru dan inflasi.
 - 8) Ketidaksamaan sosial dalam kesempatan untuk bekerja atau memperoleh keuntungan yang mencakup ketidaksamaan perlakuan.

Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan

Kekurangan harta atau materi berharga menyebabkan adanya kemiskinan yang diderita oleh seseorang adalah hasil dari interaksi oleh sejumlah faktor yang saling memengaruhi. Untuk lebih

Indikator dan Ukuran Kemiskinan

Ukuran dan Indikator kemiskinan dibedakan antara kemiskinan absolut dengan kemiskinan relatif. Kedua indikator dan ukuran kemiskinan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator dan Ukuran Kemiskinan Absolut

BKKBN (2003: 25) menyebutkan indikator kemiskinan adalah:

- a) *Untuk keluarga pra sejahtera* terdiri dari: Seluruh anggota keluarga tidak bisa makan dua kali sehari atau lebih; Tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja, sekolah dan bepergian; bagian lantai terluas dari tanah.
- b) *Untuk keluarga sejahtera I* terdiri dari: Seminggu sekali keluarga tidak selalu dapat makan daging/ ikan/ telur; Belum tentu setahun sekali anggota keluarga memperoleh minimal satu stel pakaian baru; Lantai rumah kurang dari 8 m² untuk tiap penghuni.

BAPPENAS dalam Sahdan (2005), indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh BAPPENAS mempunyai makna yang relatif luas yaitu dari berbagai sisi kebutuhan kehidupan antara lain: terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; terbatasnya kesempatan kerja; dan berusaha; lemahnya perlindungan terhadap aset usaha dan perbedaan upah; terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; terbatasnya akses terhadap akses air bersih; lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam; serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; lemahnya jaminan rasa aman; lemahnya partisipasi; besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; tata kelola pemerintah yang buruk; beban kependudukan; inefisiensi dan inektivitas dalam pelayanan publik.

2. Indikator dan Ukuran Kemiskinan Relatif

Menurut pendapat Rusli dkk (1995: 15): “Kemiskinan relatif menunjukkan ketidakmerataan pendapatan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu kelompok atau satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lain.”

Bank Dunia menggunakan ukuran ketidakmerataan sebagai berikut:

- Tingkat ketidakmerataan tinggi bila 40% penduduk terbawah menerima kurang dari 12% jumlah pendapatan.
- Tingkat ketidakmerataan sedang bila menerima antara 12 - 17%.
- Tingkat ketidakmerataan rendah bila menerima lebih dari 17% .

Menurut pendapat Harbani Pasolong (2013: 87) indikator dan ukuran yang termasuk kategori miskin adalah:

- Keluarga miskin tingkat pengeluaran beras per kapita pertahun senilai 320 kg untuk penduduk pedesaan dan 480 kg untuk penduduk perkotaan.
- Keluarga sangat miskin pedesaan tingkat pengeluaran beras perkapita pertahun senilai 240 kg untuk penduduk pedesaan dan 360 kg untuk penduduk perkotaan.
- Keluarga paling sangat miskin tingkat pengeluaran beras perkapita pertahun senilai kurang 180 kg untuk penduduk pedesaan dan 220 kg untuk penduduk perkotaan.

Penyebab Kemiskinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas, menyebutkan berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang disebabkan: Sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif; Keterbatasan sumber daya dan keterisolasian; dan Rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat.
- b. Kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang disebabkan: Perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi; Perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan; Bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Menurut Bapenas Penyebab Utama Kemiskinan adalah: Pendidikan yang rendah; ketimpangan kepemilikan modal dan lahan pertanian; Ketidakmerataan investasi di sektor pertanian; Alokasi anggaran kredit yang terbatas; Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar; Pengelolaan ekonomi secara tradisional; Rendahnya produktivitas dan pembentukan modal; Budaya menabung yang belum berkembang; Tidak adanya jaminan sosial bagi masyarakat desa; Rendahnya jaminan kesehatan.

Gambaran Umum Profil Kabupaten Bogor

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor (2014) menjelaskan bahwa wilayah Kabupaten Bogor memiliki luas 2.301,95 km², berarti Kabupaten Bogor luasnya sekitar 5,19% dari luas Wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara geografis terletak antara 6,190 LU – 6,470 LS dan 106 1' – 107 0 103' Bujur Timur dengan tipe morfologi wilayah bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, yaitu

sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15-100 meter di atas permukaan laut (dpl), 42,62% berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, 19,53% berada pada ketinggian 500-1000 meter dpl, 8,43% berada pada ketinggian 1.000-2.000 meter dpl dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000-2.500 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Bogor memiliki batas wilayah strategis antara lain: Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten dan Cianjur. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak. Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dan Kota Bekasi. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Karawang. Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Sebelah Tengah berbatasan dengan Kota Bogor.

Wilayah Kabupaten Bogor termasuk beriklim tropis sangat basah di bagian Selatan dan iklim tropis basah di bagian Utara, dengan rata-rata curah hujan tahunan 2.500–5.000 mm/tahun, kecuali di wilayah bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujan kurang dari 2.500 mm/ tahun.

Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20°- 30°C, dengan rata-rata tahunan sebesar 25°C. Kelembaban udara 70% dan kecepatan angin cukup rendah, dengan rata-rata 1,2 m/detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata-rata sebesar 146,2 mm/ bulan.

Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan batuan penyusunnya

didominasi oleh hasil letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan basalt. Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan relatif lulus air dimana kemampuannya meresapkan air hujan tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini relatif rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi.

Wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 7 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: DAS Cidurian; DAS Cimanceuri; DAS Cisadane; DAS Ciliwung; Sub DAS Kali Bekasi; Sub DAS Cipamingkis; dan DAS Cibeet. Selain itu juga terdapat 3 jaringan irigasi pemerintah, yaitu:

- Jaringan irigasi pedesaan, 900 buah; situ 95 buah; mata air. 96 buah
- Luas Lahan tanah wilayah kabupaten Bogor sejumlah 18.696.328.13 Ha dan sebagian besar dipergunakan untuk lahan sawah dan ladang, perkebunan rakyat, pemukiman, dan ada yang masih belum dimanfaatkan yaitu Tanah kosong seluas 36.351,9 dan Semak Belukar seluas 44.956,1 Ha bisa untuk dipergunakan lainnya.

Penduduk menjadi modal terbesar dalam pembangunan, sekaligus beban pemerintah dalam memberikan fasilitas untuk meningkatkan kesejahteraannya terutama faktor kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan disektor pertanian dan industri. Secara umum, kondisi demografis dapat digambarkan bahwa penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan mei tahun 2016 berjumlah 5.587.390 jiwa (penduduk laki-laki 2.856.529 jiwa dan perempuan 2.730.861 jiwa). Jumlah penduduk tersebut tergabung dalam 28.034 kepala keluarga. (KK) Untuk kepadatan penduduk 29 Jiwa per Km persegi artinya penduduk termasuk padat.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 40 Kecamatan dan 434 Desa. Dari jumlah desa tersebut 417 berstatus Desa dan 17 berstatus Kelurahan bila dilihat dari klasifikasi Desanya terdapat 357 Desa Swakarya dan 77 Desa Swasembada serta memiliki 3.868 Rukun Warga/ Rukun Kampung dan 15.497 Rukun Tetangga dengan rasio Rukun Tetangga terhadap Rukun Warga sebesar 4.

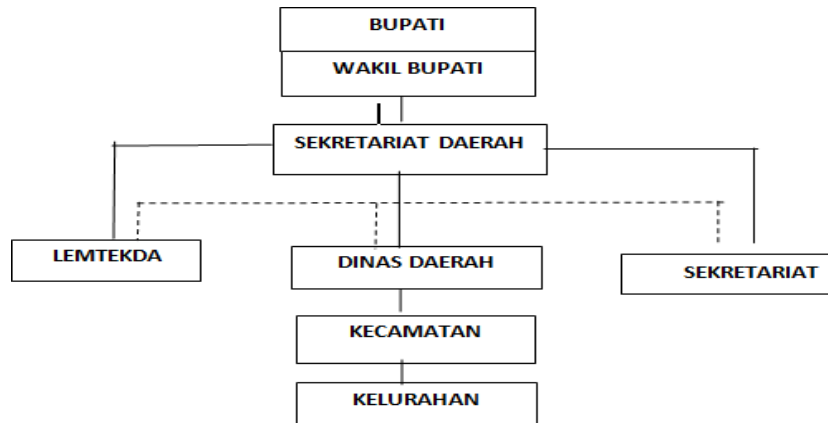
Visi dan Misi Kabupaten Bogor

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, **Visi** Pemerintah Kabupaten Bogor untuk periode Tahun 2013-2018 adalah: **“Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”**.

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan 5 (lima) Misi, yaitu:

- 1) Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata.
- 3) Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- 5) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerja sama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 sebagai berikut.



Tabel 3 Strategi Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Bogor Melalui Analisis SWOT
Tabel Analisis SWOT

Strength	Weakness
a. Wilayah Kabupaten Bogor memiliki potensi pertanian yang cukup baik, dimana produksi hasil pertanian cukup besar. b. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani. c. Terdapatnya perkembangan kawasan lahan pertanian untuk tanaman pangan yang di indikasikan maraknya masyarakat petani lebih suka berkebun tanaman pangan. d. Terdapatnya beberapa jenis usaha industri menengah besar dan industri kecil menengah sebagai bentuk pasca usaha tani baik hasil dari sungai dan dari hasil kebun serta kerajinan.	a. Area lahan pertanian berubah fungsi menjadi perumahan dan kawasan industri. b. Tingkat pendidikan keluarga yang relatif masih rendah, c. Sarana dan prasarana pertanian yang sangat masih terbatas. d. Tingkat pendapatan keluarga miskin yang masih rendah. e. Rendahnya daya beli Masyarakat f. Produktivitas dan kualitas hasil pertanian masih rendah. g. Terbatasnya akses pasar dan pemasaran h. Belum maksimalnya fungsi Koperasi Usaha Mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dalam menunjang pengembangan ekonomi wilayah.
Opportunity	Threat
a. Terdapat beberapa usaha pasca tani sebagai usaha kecil menengah yang dikelola oleh masyarakat. b. Terdapat kelompok-kelompok masyarakat petani yang mengembangkan budidaya pertanian. c. Terdapatnya daya tarik objek Wisata.	a. Menurunnya kualitas lahan dan semakin tingginya perubahan guna lahan akibat adanya perluasan kawasan permukiman dan Industri yang terpencar serta cepat. Penggunaan Lahan Sawah b. Mahalnya beban operasional bagi petani seperti pupuk dan pembasmi hama sehingga menghambat produktivitas petani.

MATRIX SWOT

	Strenght	Weakness
Opportunity	STRATEGI SO a. Potensi pertanian yang cukup baik, dimana produksi hasil pertanian cukup besar sehingga terdapat beberapa usaha pasca tani sebagai usaha kecil menengah yang dikelola oleh masyarakat. b. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sehingga terdapat kelompok-kelompok masyarakat petani yang mengembangkan budidaya pertanian.	STRATEGI WO a. Rendahnya daya beli Masyarakat akan ditingkatkan melalui daya tarik objek Wisata. b. Belum maksimalnya fungsi Koperasi Usaha Mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dalam menunjang pengembangan ekonomi wilayah akan ditingkatkan melalui beberapa usaha pasca tani sebagai usaha kecil menengah yang dikelola oleh masyarakat. c. Tingkat pendapatan keluarga miskin yang masih rendah akan ditingkatkan dengan mengembangkan budidaya pertanian.
	Strenght	Weakness
Threat	STRATEGI ST Terdapatnya perkembangan kawasan lahan pertanian untuk tanaman pangan diharapkan dapat mengatasi mahalnya beban operasional bagi petani seperti pupuk dan pembasmi hama sehingga menghambat produktivitas petani.	STRATEGI WT Produktivitas dan kualitas hasil pertanian ditingkatkan untuk mengatasi tingginya perubahan guna lahan akibat adanya perluasan kawasan permukiman dan Industri yang terpencar serta cepat.

Strategi Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Bogor Melalui Analisis Litmust Test

Berdasarkan pada analisis SWOT dan Matrix SWOT, maka digunakanlah uji litmus test untuk menentukan tingkat isu tersebut. Menurut Bryson (2007: 185): Isu yang benar-benar strategis adalah isu yang memiliki skor tinggi pada semua dimensi. Sedangkan isu operasional adalah isu dengan skor rendah pada semua dimensi.

Pengujian diberikan dengan memberikan skor dari angka 1 sampai dengan 3. Total skor 1-13 menunjukkan operasional, 14-26 adalah moderat dan 27-29 adalah strategis.

LITMUS TEST

No.	Isu Strategis	Pengembangan sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat	Meminimalisasi Resiko Usaha	Pengaruh isu strategis terhadap kegiatan usaha masyarakat	Strategi Pemecahan Masalah			S K O R
					Melakukan studi komparatif terhadap permasalahan	Melaksanakan program kemitraan	Menciptakan peluang usaha melalui program pendampingan	
STRATEGI SO								
a.	Potensi pertanian yang cukup baik, dimana produksi hasil pertanian cukup besar sehingga terdapat beberapa usaha pasca tani sebagai usaha kecil menengah yang dikelola oleh masyarakat.	3	3	3	2	3	3	17
b.	Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sehingga terdapat kelompok-kelompok masyarakat petani yang mengembangkan budidaya pertanian.	3	3	3	2	3	2	16
STRATEGI WO								
a.	Rendahnya daya beli Masyarakat akan ditingkatkan melalui daya tarik objek Wisata.	3	3	2	3	3	3	17
b.	Rendahnya daya beli Masyarakat akan ditingkatkan melalui daya tarik objek Wisata.	3	3	3	3	2	2	16
c.	Tingkat pendapatan keluarga miskin yang masih rendah akan ditingkatkan dengan mengembangkan budidaya pertanian.	3	2	3	2	3	3	16

STRATEGI ST								
	Terdapatnya perkembangan kawasan lahan pertanian untuk tanaman pangan diharapkan dapat mengatasi mahalanya beban operasional bagi petani seperti pupuk dan pembasmi hama sehingga menghambat produktivitas petani.	3	3	3	3	2	3	17
STRATEGI WT								
	Produktivitas dan kualitas hasil pertanian ditingkatkan untuk mengatasi tingginya perubahan guna lahan akibat adanya perluasan kawasan permukiman dan Industri yang terpecah serta cepat.	2	3	3	2	3	3	16

SIMPULAN

Sebagai simpulan dapat dikatakan, bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk mengatasi hambatan permasalahan kemiskinan dalam bentuk yaitu:

1. Keterlibatan Pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Kebijakan dan program Penanganan kemiskinan Pemerintah Pusat.
3. Kebijakan dan program penanganan kemiskinan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

SARAN

Dalam menanggulangi kemiskinan pada masa yang akan datang, agar Kabupaten Bogor dapat menjadi lebih baik lagi maka disarankan sebagai berikut.

1. Karena kemiskinan bersifat multidimensional, maka program pengentasan kemiskinan seyogyanya tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi saja, tetapi juga memerhatikan dimensi lain, diarahkan untuk mengikis budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan dan sebagainya.
2. Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi

yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar keluarga miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan, pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja serta informasi pasar.

3. Melibatkan keluarga miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan.
4. Kemampuan dan keterampilan kerja/ usaha melalui pendidikan dan latihan latihan kerja, perluasan jaringan usaha dan informasi pasar, bantuan modal kerja. Tidak mudah memang untuk melakukan semua ini tapi dengan niat, tekad, komitmen dan *political will* yang kuat dari pemerintah dan kemauan yang serius dari masyarakat miskin sendiri, kiranya dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bryson, Jhon M. 2007. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Frices, Z. Helvin. 2011. *Be An Entrepreneur*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lincoln. 1985. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mubiyarto, Suratno. 1981. *Metode Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mubiyarto. 1987, *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty dan P3PK UGM.
- Warsono, Muhamad. 2012. *Strategi Pemerintahan* Jakarta: PT Glora Aksara Pratama.
- Masyuri, Zaenudin. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardalis. 2010. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Heru. 2001. *Pasar dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasolong, Harbani.,2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Robbins, P. Stephen. 1994. *Teori Organisasi Struktur Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Rangkuti, Freddy. 1995. *Tehnik Membedah Kasus Bismis Analisis SWOT*. Jakarta: Gramedia.
- Rasyid, Ryaas. 1996. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Yarsif Wantampone.
- Stainer, George. 1997 (ed-2). *Kebijakan dan Strategi*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Sugiyono. 1994. *Metodologi Penelitian Administratif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifudin, Anwar. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarundayang. 1999. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Sahdan, Gregorius. 2005. *Menganggulasi Kemiskinan Desa*. Jakarta: Kompas.
- Siagian, Sondang. 2007. *Analisis Perumusan Kebiaksanaan Strategi Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Suparlan, Parsudi. 2008. *Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural* Jakarta: Obor.
- Subagyo, Joko, dkk. 2011. *Strategi Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Usman, Huseini, dkk. 1996. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Propenas Penanggulangan Kemiskinan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Surat Keputusan Presiden RI, 1978, tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di daerah Pedesaan dan Perkotaan, Depdikbud RI Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/Kota
- Surat Menteri Keuangan Nomor 102/DADPD/0/0399, Tanggal 26 Maret 1999 Perihal Surat Pengesahan Program penanganan kemiskinan.
- Surat keputusan Kepala BAPENAS Nomor./1993, tentang Penanggulangan Kemiskinan, BAPENAS, Jakarta.
- Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 1994 Tntang Cara Mengukur Kemiskinan, BPS, Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
- Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 tentang Peningkatan Daya Saing Komoditas Kabupaten Bogor.
- Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan.

